

MAKALAH KELOMPOK 5
PANCASILA SEBAGAI ETIKA
POLITIK

DISUSUN

OLEH :

- 1. MILLISANI (1402050138)**
- 2. NANDA SYAFITRI (1402050058)**
- 3. INTAN AGUSTIN SIREGAR**
(1402050191)
- 4. SYAFRINA RAUDHA (1402050181)**
- 5. TRI ANGGI HUTAMI (1402050201)**



FAKULTAS KEGURUANDAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2014/2015

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat taufik hidayah kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang merupakan salah satu materi mata pelajaran “ **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**”. Selawat berserta salam tetap tercurah buat Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan makalah ini sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing, serta pihak-pihak yang telah memberikan dorongan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah ini yang berjudul “ **Pancasila Sebagai Etika Politik**”

Kami menyadari akan kekurangan dalam pembuatan dan penulisa makalah ini. Yang mana kami masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang tujuannya membangun dari pembaca budiman untuk kesempurnaan makalah ini yang masa akan datang . Untuk itu kami ucapkan terimah kasih

Penulis, September 2014

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Dafatar isi.....	ii
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	3
Bab II : permasalahan.....	4
Bab III: pembahasan	
A. Pengertian Pancasila.....	6
B. Pengertian Etika, Nilai, Norma, Moral, dan Hierarkhi Nilai.....	6
C. Hubungan antara Nilai, Norma, dan Moral.....	16
D. Pengertian Etika Politik dan Politik.....	16
E. Lima perinsip etika politik pancasila.....	21
F. Definisi Dimensi Politis Manusia.....	24
G. Nilai-nilai terkandung dalam pancasila sebagai sumber etika politik.....	25
Bab IV: Penutup	
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran.....	29
Daftar Pustaka.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah dasar Negara sekaligus pandangan hidup bagi setiap masyarakat Indonesia tidak peduli pemerintahan atau rakyat jelata sekalipun. Dasar berarti material pembangunan fundamental diaman segala hala atau kebijaksanaan dalam pemerintah harus selalu merujuk kepada pancasila guna menciptakan fundamentak yang kuat.

Namun, sayangnya akhir-akhir ini banyak sekali oknum yang mengabaikan nilai-nilai luhur pancasila. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan bukti bahwasanya banyak masyarakat Indonesia yang telah jauh menyimpang dari Pancasila. Tanda Tanya besar, mengapa hal seburuk itu bias terjadi? Jawabannya adalah disebabkan kurangnya pengetahuan agama sehingga tidak ada kereligiusan yang seperti terkandung dalam pancasila. Selain itu, minimnya pemahaman nilai, norma dan moral semakin menambah kuantitas penyelewengan nilai-nilai pancasila. Dalam dunia pemerintahan pun tidak sedikit dari Masyarakat Indonesia yang kurang memahami etika perpolitikan.

Oleh karena itu, pembuatan karya-karya yang menekankan dalam bidang nilai, norma, moral, dan etika politik sangat dibutuhkan. Wujud dari kepedulian agar masyarakat Indonesia memahami lebih jauh pancasila yang merupakan pandangan hidup mereka adalah dengan mengantarkan karya sederhana ini yang Insya Allah dapat membantu supaya Pancasila senantiasa teraplikasi pada setiap diri masyarakat Indonesia. Nilai-nilai pancasila kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma tersebut meliputi norma moral yaitu

yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Kemudian yang ke dua adalah norma hukum yaitu suatu system perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, Pancasila juga merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang terkait dengan judul diatas

adalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian etika, nilai, norma, dan hierarki nilai?
2. Bagaimana hubungan antara nilai, norma, dan moral?
3. Bagaimana pengertian Etika politik dan politik?
4. Bagaimana lima prinsip dasar etika politik dalam Pancasila?
5. Apa definisi dimensi politisi manusia?
6. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian nilai, norma dan moral dalam konteks Pancasila sebagai etika politik
2. Dapat mengerti hubungan antara nilai, norma dan moral dalam konteks Pancasila sebagai etika politik
3. Dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam etika politik

BAB II

PERMASALAHAN

Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 patut dipelajari, didalami, dihayati dan diamalkan dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sayangnya akhir-akhir ini banyak sekali oknum yang mengabaikan nilai-nilai luhur pancasila. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bukti bahwasanya banyak masyarakat Indonesia yang telah jauh menyimpang dari pancasila. Hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan agama sehingga tidak ada

kereligiusan yang seperti terkandung dalam Pancasila. Selain itu, minimnya pemahaman nilai, norma dan moral semakin menambah kuantitas penyelewengan nilai-nilai Pancasila. Dalam dunia pemerintahan pun tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang kurang memahami etika perpolitikan.

Secara hukum Indonesia memang sudah merdeka, namun jika kita telaah secara individu (minoritas) hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keadilan bersama. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan rakyat yang adil dan makmur lenyap ditelan kepentingan politik pribadi. Dalam fakta sejarah tidak sedikit orang berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Bertemunya berbagai kepentingan antar golongan, kelompok dan parpol dalam kalangan elit politik adalah sebuah keniscayaan akan terjadinya konflik bila tidak adanya kesefahaman bersama, dan tidak jarang berujung pada penyelesaian dengan jalan kekerasan. Rambu-rambu moral memang sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab. Tetapi hal itu hanya menjadi bagian dari retorika politik.

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengertian Pancasila

Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua suku kata yaitu "panca" yang berarti lima dan "sila" yang berarti prinsip, dasar, atau asas. Pancasila merupakan lima prinsip dasar/asas sebagai dasar negara yang menjadi pedoman hidup atau pandangan hidup, baik tentang bertuhan maupun tentang bagaimana hidup bermasyarakat serta berhubungan dengan sesama warga, bangsa dan bernegara. Pancasila terdiri atas lima sendi utama penyusunnya. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, Persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sendi utama penyusun Pancasila tersebut termaktub dalam paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

B. Pengertian Etika, Nilai, Norma, Moral, dan Hierarkhi Nilai

1. Pengertian Etika

Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat pertama berisi tentang segala sesuatu yang ada sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui dan tentang yang transenden.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan Manusia sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip etika khusus dibagi menjadi etika individu yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang

menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika banyak bertangkutan dengan Prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan, tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

- a. **Etika Umum**, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
- b. **Etika Khusus**, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu(etika individual) maupun makhluk sosial (etikasosial).

2. Pengertian Nilai

Nilai (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya.

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian itu pastilah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan.

Nilai atau “value” (bahas Inggris) termasuk bidang kajian filsafat, persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (Axiology, theory of value). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “kebiasaan” (wath) atau kebaikan (goodness) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena, 229)

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat, martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, disamping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai.

Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan menekankan pada segi-segi

kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik.

Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu system merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping system social dan karya. Oleh karena itu, Alport mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi.

Didalam Dictionary of sociology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (the believed capacity of any object to satisfy a human desire). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek itu sendiri. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita – cita, harapan – harapan, dambaan – dambaan dan keharusan.

Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang das Sollen, bukan das Sein, kita masuk kerokhanian bidang makna normatif, bukan kognotif, kita masuk ke dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, diatarasaling berhubungan atau saling berkait secara erat, artinya bahwa das Sollen itu harus menjelma menjadi das Sein, yang ideal harus menjadi real, yang normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari – hari yang merupakan fakta.

3. Pengertian Norma

Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:

- a. **Norma agama**, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rosul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Sanksi terhadap pelanggaran norma agama sifatnya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa).
- b. **Norma kesusilaan**, yaitu petunjuk pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksi yang diberikan sifatnya tidak tegas, karena diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya).
- c. **Norma kesopanan**, yaitu petunjuk hidup yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan terhadap yang melanggarnya sifatnya tidak tegas tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan terhadap pergaulan.
- d. **Norma hukum**, yaitu petunjuk hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan) sanksi terhadap pelanggaran norma hukum

sifatnya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang terkecuali, biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda.

4. Pengertian Moral

Moral berasal dari kata mos (mores) yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral.

Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral, filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

5. Pengertian Hierarkhi Nilai

Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu –masyarakat terhadap sesuatu obyek. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai material. Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan yaitu :

- a. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak,
- b. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni : jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum,

- c. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni,
- d. Nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci.

Walter G . everet menggolongkan nilai – nilai manusiawi kedalam delapan kelompok yaitu:

- a. Nilai-nilai ekonomi
- b. Nilai-nilai kejasmanian
- c. Nilai-nilai hiburan
- d. Nilai-nilai sosial
- e. Nilai-nilai estetis
- f. Nilai-nilai intelektual
- g. Nilai-nilai keagamaan

Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia,
- b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan,
- c. Nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani manusia

yang dibedakan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

- 1) Nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal atau cipta manusia.
- 2) Nilai keindahan/estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia.
- 3) Nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
- 4) Nilai religius yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak.

Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan anjuran atau larangan, tidak dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai.

Dari uraian mengenai macam – macam nilai diatas, dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang bewujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non material atau immaterial. Notonagoro berpendapat bahwa nilai – nilai pancasila tergolong nilai – nilai kerokhanian, tetapi nilai – nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan vital. Dengan demikian nilai – nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai ‘dasar’ sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai ‘tujuan’.

Nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis

Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabaran maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

a. Nilai dasar

nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalkan hakikat tuhan, manusia dengan segala sesuatu lainnya. Demikian juga hakikat nilai dasar itu dapat juga berlandaskan pada hakikat suatu benda, kuantitas, kualitas, aksi relasi maupun waktu. Demikian sehingga nilai dasar dapat juga disebut sebagai sumber norma yang pada

gilirannya dijabarkan atau direlisasika dalam suatu kehidupan yang bersifat peraktis

b. Nilai instrumental

Nilai instrumental yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Bila mana nilai instrumental tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal ini merupakan suatu nilai norma. Dan nilai instrumental sendiri juga dapat dikatakan bahwa nilai instrumental merupakan suatu eksplitasi dari nilai dasar.

c. Nilai praksis

Niali praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Artinya oleh karena nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu system perwujudannya tidak boleh minyimpang dari system tersebut .

C. Hubungan antara Nilai, Norma dan Moral

Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digaris bawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tersebut di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan moral maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu

amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalinya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral.

D. Pengertian Etika Politik Dan Politik

1. Pengertian Etika Politik

Etika, atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik yang demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan mana yang jelek. Apa standar baik? Apakah menurut agama tertentu? Tidak! Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri ini. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal.

Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar, dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan (kekuasaan) dan akses ekonomis (uang) yang begitu kuat, rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan.

Akibatnya ada dua hal: (a) pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada, dan (b) tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Untuk memaafkan fenomena tersebut lalu berkembang menjadi budaya permisif, semua serba boleh, bukan saja karena aturan yang hampa atau belum dibuat, melainkan juga disebut serba boleh, karena untuk membuka seluas-luasnya upaya mencapai kekuasaan (dan uang) dengan mudah.

Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang. Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik (dan bidang lainnya) sedang berlarian tunggang-langgang (meminjam Giddens, “run away”) menuju ke arah “jual-beli” menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa dihargai dengan uang.

Namun demikian, perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi. Moralitas politisi menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi (dan memang sangat diandaikan), misalnya apakah ia korup atau tidak (di sini tidak dibahas). Etika politik menjawab dua pertanyaan:

- a. Bagaimana seharusnya bentuk lembaga-lembaga kenegaraan seperti hokum dan Negara (misalnya: bentuk Negara seharusnya demokratis); jadi etika politik adalah etika institusi.
- b. Apa yang seharusnya menjadi tujuan/sasaran segala kebijakan politik, jadi apa yang harus mau dicapai baik oleh badan legislatif maupun eksekutif.

Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca tradisional. Dalam tulisan para filosof politik klasik: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, kita menemukan pelbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistematis. Dua pertanyaan etika politik di atas baru bisa muncul di ambang zaman modern, dalam rangka pemikiran zaman pencerahan, karena pencerahan tidak lagi menerima tradisi/otoritas/agama, melainkan menentukan sendiri bentuk kenegaraan menurut *ratio/nalar*, secara etis. Karena itu, sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti:

- a. Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara (John Locke)
- b. Kebebasan berpikir dan beragama (Locke)
- c. Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquieu)
- d. Kedaulatan rakyat (Rousseau)
- e. Negara hukum demokratis/republican (Kant)
- f. Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
- g. Keadilan sosial

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan

masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik.

Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita The Rule Of Law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.

2. Pengertian Politik

Pengertian 'politik' berasal dari kosakata 'politics', yang memiliki makna bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau ' negara', yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian – pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep – konsep pokok yang berkaitan dengan :

1. negara (state)
2. kekuasaan (power)
3. pengambilan keputusan (decision making)
4. kebijaksanaan (policy)
5. pembagian (distribution)
6. serta alokasi (allocation).

Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga – lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pengertian politik yang lebih luas, yaitu

menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara.

Oleh karena itu, dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik tersebut harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsure yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat Negara.

E. Lima perinsip dasar etika politik pancasila

Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai lima prinsip berikut ini disusun menurut pengelompokan pancasila, karena pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern.

1. Pluralisme

Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralism mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi, pluralism memerlukan kematangan.

Memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan kelompok orang. Terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karna keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti peradaban dan kematangan karakter klektif bangsa

2. Hak Asasi Manusia

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradap karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib

diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian sebagai berikut :

- a. Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara masyarakat, melainkan karena pemberian sang pencipta.
- b. Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan arena itu mulai disadari, diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan sebaliknya diancam oleh Negara modern.

3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.

4. Demokrasi

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideology berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa

mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar yaitu:

- a. Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
- b. Kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsure harkiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah pemerintah yang sewenang-wenang).

5. Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologys, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideology-ideoligi, agama-agama tertentu keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang ketidakadilan-adilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar, ras, suku, dan budaya.

Untuk itu tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:

- a. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial
- b. Ekstremisme ideologi yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak. Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat
- c. Korupsi

F. Definisi Dimensi Politisi Manusia

1. Manusia sebagai Makhluk Individu – Sosial

Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Kalangan kolektivisme merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja. Manusia di pandang sebagai sekedar sarana bagi masyarakat. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Manusia di dalam hidupnya mampu ber-eksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena dalam hubungannya dengan orang lain. Segala keterampilan yang dibutuhkannya agar berhasil dalam segala kehidupannya serta berpartisipasi dalam kebudayaan diperolehnya dari masyarakat.

Dasar filosofis sebagaimana terkandung dalam Pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia adalah bersifat 'monodualis'. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialis melainkan monodualistis.

2. Dimensi Politik Kehidupan Manusia

Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem – sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Dalam hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis manakala diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh kerangka kehidupannya serta ditentukan kembali oleh tindakan – tindakannya.

Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia.

G. Nilai-nilai Tergandung Dalam Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafah negara pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ serta sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ adalah merupakan sumber nilai – nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri di jalankan sesuai dengan:

1. Asas legalitas (legitimasi hukum).
2. Di sahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis)
3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip moral / tidak bertentangan

dengannya (legitimasi moral).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kenijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarka legitimasi moral religius (sila 1) serta moral kemanusiaan (sila 2). Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh krena itu ‘ keadilan’ dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebgai mana terkandung dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan pnyelenggraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila 4). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu pelaksanaan dan pnyelenggraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok Negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari makalah yang kami buat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. **Etika adalah** suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan- pandangan moral. **Nilai adalah** kemampuan yang di percaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia **Moral adalah** tentang ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia **Hierarkhi nilai** adalah nilai yang tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu-masyarakat terhadap suatu obyek.

2. Hubungan antara nilai, norma, dan moral ialah suatu kenyataan yang seharusnya tetap dipelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak bila seseorang individu, masyarakat, bangsa, dan Negara menghendaki fondasi yang tumbuh dan berkembang.

3. **Etika politik** adalah menerangkan tentang kebaikan dan kejahatan yang memiliki tujuan menjelaskan dimana tingkah laku politik yang baik dan buruk.

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari system tsb dan diikuti dengan melaksanakan tujuan tersebut.

4. Lima prinsip dasar etika politik pancasila terdapat 5 bagian karena memiliki logika internal yang sesuai tuntutan dasar etika politik modern.

a. Pluralime : kesediaan untuk menerima pluralitas

b. Hak asasi manusia : bukti kemanusiaan yang adil dan beradab

- c. Solidaritas bangsa : manusia tidak hanya hidup sendiri-sendiri
- d. Demokrasi : sebuah system penerjemah kehendak masyarakat dalam tindakan politik
- e. Keadilan sosial : tidak boleh dipahami secara ideologis

5. Definisi dimensi politisi manusia terbagi 2 :

- a. Manusia sebagai makhluk individu-sosial

Paham individualism yang merupakan akal bakal paham liberalism memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diikuti berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu.

- b. Dimensi politis kehidupan manusia

Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan Negara, system-sistem Nilai serta ideology yang memberikan legitimasi kepadanya.

- 6. Nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai sumber etika politik dapat dilihat dari Sila pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ serta sila kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ adalah merupakan sumber nilai – nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kenijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarka legitimasi moral religius (sila 1) serta moral kemanusiaan (sila 2). Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh krena itu ‘ keadilan’ dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebgai mana terkandung dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara.

B. Saran

Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai segi terwujud dengan adanya kesianambungan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kepastian masyarakat untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang ditetapkan, karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang absolut dengan adanya dukungan rakyat sebagai bagian terpenting dari terbentuknya suatu Negara

DAFTAR PUSTAKA

1. [http:// www.scribd com/doc/2433447/Pancasila Sebagai Etika Poltik.](http://www.scribd.com/doc/2433447/Pancasila%20Sebagai%20Etika%20Politik)
HtmlDiakses tanggal 22 maret2012.
2. http://www.academia.edu/5299055/Pancasila_Sebagai_Etika_Politik

3. Suprpto, Ngadimin winata, Edison A.jamli, Suharyanto, Vipti Retina
Nugraheni, Sri Ruspita Murni.2002. pendidikan kewarganegaraan.
Jakarta: Bumi aksara.